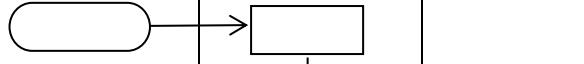
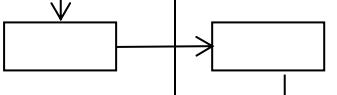
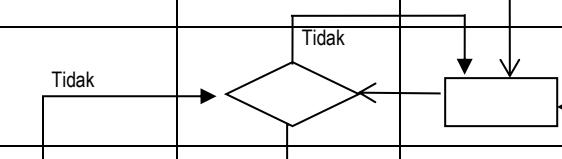
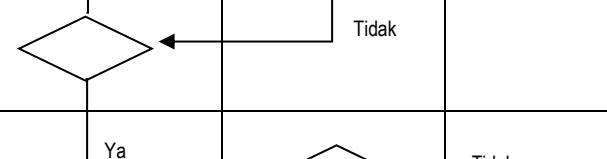
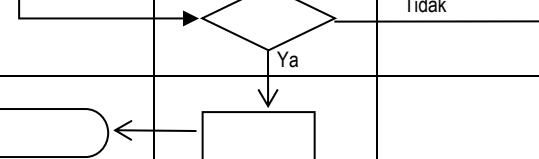




**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**
TIM NERACA WILAYAH

		Nomor SOP	SOP-072/17000/2025
		Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	2 Januari 2025
		Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
DASAR HUKUM :	NAMA SOP		PENGHITUNGAN PMTB ATAS DASAR HARGA BERLAKU
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Statistik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik; 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan; 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ; 10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.		KUALIFIKASI PELAKSANA : Memahami pengolahan data, ekonomi makro, pendapatan nasional dan perilaku PMTB, baik konsep dan definisi maupun cara penghitungannya	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN		1. Data Sekunder 2. Lembar Kerja 3. Pengolah
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :		Jika Penghitungan PMTB gagal atau sistem tidak berjalan dengan baik maka PDRB dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan
<u>Maksud dan tujuan:</u> Menghitung PMTB atas dasar harga berlaku			

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim Neraca Wilayah	Fungsional	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Persiapan					1 hari	Lembar kerja	
2.	Pengumpulan data dan Fenomena				Output Konstruksi, Realisasi Belanja Modal Indeks Harga dll	15 Hari	Data sekunder PMTB	
3.	Penghitungan PMTB Harga Berlaku				Lembar Kerja, Data sekunder PMTB	1 Minggu	PMTB ADHB	
4.	Angka Inisial PMTB (Putaran NOL)				PMTB ADHB dan Fenomena	3 Hari	Angka Inisial PMTB	
5.	Rekonsiliasi PMTB atas dasar harga berlaku				PMTB putaran Nol	2 Minggu	PMTB atas dasar harga berlaku	
6	PMTB atas dasar harga berlaku							

